

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Landasan Teori

1. Teori Ketimpangan

Ketimpangan wilayah merupakan fenomena dimana terjadinya ketidakmerataan antar wilayah yang disebabkan oleh beberapa faktor seperti perbedaan kondisi wilayah. Ketimpangan pada kenyataannya tidak dapat dihilangkan dalam pembangunan suatu daerah. Adanya ketimpangan akan memberikan dorongan kepada daerah yang terbelakang untuk dapat berusaha meningkatkan kualitas hidupnya agar tidak jauh tertinggal dengan daerah sekitarnya. Selain itu daerah-daerah tersebut akan bersaing guna meningkatkan kualitas hidupnya, sehingga ketimpangan dalam hal ini memberikan dampak positif. Akan tetapi ada pula dampak negatif yang ditimbulkan dengan semakin tingginya ketimpangan antar wilayah. Dampak negatif tersebut berupa inefisiensi ekonomi, melemahkan stabilitas sosial dan solidaritas, serta ketimpangan yang tinggi pada umumnya dipandang tidak adil (Todaro dan Smith, 2004).

Kemudian Todaro dan Smith (2004) juga menjelaskan bahwa pembangunan memerlukan Produk Nasional Bruto (PNB)

yang tinggi dan pertumbuhan yang cepat. Namun masalah dasarnya bukan hanya bagaimana menumbuhkan PNB, tetapi juga siapakah yang akan menumbuhkan PNB, sejumlah besar masyarakat yang ada di dalam sebuah negara atautkah hanya segelintir orang di dalamnya. Jika yang menumbuhkannya hanya orang-orang kaya yang berjumlah sedikit, maka manfaat pertumbuhan tersebut hanya dinikmati mereka saja sehingga kemiskinan dan ketimpangan akan semakin parah. *Program of Action* yang dicanangkan pada *Cairo International Conference on Population and Development* pada tahun 1994 menyatakan bahwa, “walaupun pembangunan telah berjalan selama beberapa dekade, kesenjangan antara negara-negara kaya dan miskin maupun kesenjangan di dalam suatu negara itu sendiri semakin melebar”.

Menurut Sjafrizal (2014), kenyataan umum hampir di semua negara sedang berkembang, termasuk Indonesia, menunjukkan bahwa ketimpangan ekonomi antar wilayah adalah cukup besar. Hal ini dipicu oleh beberapa hal antara lain: perbedaan potensi daerah yang sangat besar, perbedaan kondisi demografis dan ketenagakerjaan, dan perbedaan kondisi sosial budaya antar wilayah. Di samping itu, kurang lancarnya mobilitas barang dan orang antar daerah juga turut mendorong terjadinya ketimpangan pembangunan regional tersebut.

Apabila ketimpangan ekonomi antar wilayah tersebut cukup besar, maka hal ini dapat membawa dampak negatif dari segi ekonomi, sosial, dan politik. Sebagaimana diungkapkan oleh Sjafrizal (2008), ketimpangan ekonomi antar wilayah yang besar akan menyebabkan kurang efisiensinya penggunaan sumber daya yang tersedia dan mendorong terjadinya ketidakmerataan dalam distribusipendapatan (kemakmuran). Sedangkan dari segi sosial, ketimpangan pembangunan antar daerah tersebut akan memicu terjadinya kecemburuan dan keresahan sosial. Bahkan kondisi tersebut selanjutnya dapat pula mempunyai implikasi politik yang mendorong timbulnya keinginan masyarakat dan organisasi politik untuk melakukan pemekaran daerah (Sjafrizal, 2014).

Sjafrizal (2014) juga menambahkan, bahwa berbeda dengan distribusi pendapatan yang melihat ketimpangan antar kelompok masyarakat, ketimpangan pembangunan antar wilayah melihat perbedaan antar wilayah. Hal yang dipersoalkan di sini bukan antara kelompok kaya dan kelompok miskin, tetapi adalah perbedaan antara daerah maju dan daerah terbelakang.

Menurut Hudiyanto (2015), ukuran yang sering digunakan untuk melihat dispersi (persebaran) antar daerah biasanya dilihat dengan menggunakan rumus yang dikembangkan oleh Williamson yang digunakan di dalam studinya pada pertengahan tahun enam puluhan. Keofisien variasi ini mengukur dispersi regional dan suatu

atribut (dalam hal ini pendapatan per kapita) yang ditimbang dengan populasi penduduk pada masing-masing daerah. Indeks Williamson memiliki angka maksimal 1, yang berarti apabila hasil perhitungan semakin mendekati angka 1 maka keadaannya sangat timpang. Sedangkan apabila hasil perhitungan mendekati angka 0 maka keadaannya hampir merata atau tidak ada ketimpangan yang berarti. Dengan demikian, formulasi Indeks Williamson dapat ditampilkan sebagai berikut:

$$IW = \frac{\sqrt{\sum_{i=1}^n (y_i - y)^2 \left(\frac{f_i}{n}\right)}}{y} \dots\dots\dots(2.1)$$

Dimana:

- y_i = PDRB per kapita daerah i
- y = PDRB per kapita rata-rata seluruh daerah
- f_i = jumlah penduduk daerah i
- n = jumlah penduduk seluruh daerah

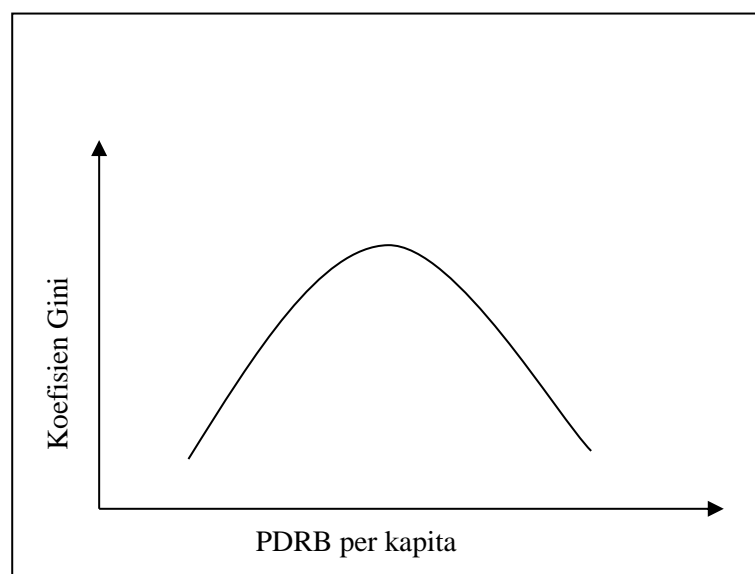
Menurut Kuznets (dalam Kuncoro, 2003), pertumbuhan ekonomi di negara miskin pada awalnya cenderung menyebabkan tingginya tingkat kemiskinan dan ketidakmerataan distribusi pendapatan. Namun bila negara-negara miskin tersebut sudah semakin maju, maka persoalan kemiskinan dan ketimpangan distribusi pendapatan akan menurun (*inverted U curve*). Beberapa ekonom pembangunan tetap berpendapat bahwa tahapan

peningkatan dan kemudian penurunan ketimpangan pendapatan yang dikemukakan Kuznets tidak dapat dihindari.

Kemudian Kuznets menambahkan bahwa disparitas dalam pembagian pendapatan cenderung bertambah besar selama tahap-tahap awal pembangunan, baru kemudian selama tahap-tahap lebih lanjut dari pembangunan berbalik menjadi lebih kecil, atau dengan kata lain bahwa proses pembangunan ekonomi pada tahap awal mengalami kemerosotan yang cukup besar dalam pembagian pendapatan, yang baru berbalik menuju suatu pemerataan yang lebih besar dalam pembagian pendapatan pada tahap pembangunan lebih lanjut. Seperti yang dijelaskan dalam Kurva Kuznets berikut, dalam jangka pendek terdapat korelasi positif antara pertumbuhan pendapatan per kapita dengan disparitas pendapatan namun dalam jangka panjang hubungan keduanya menjadi korelasi negatif.

Gambar 2.1

Kurva Kuznets

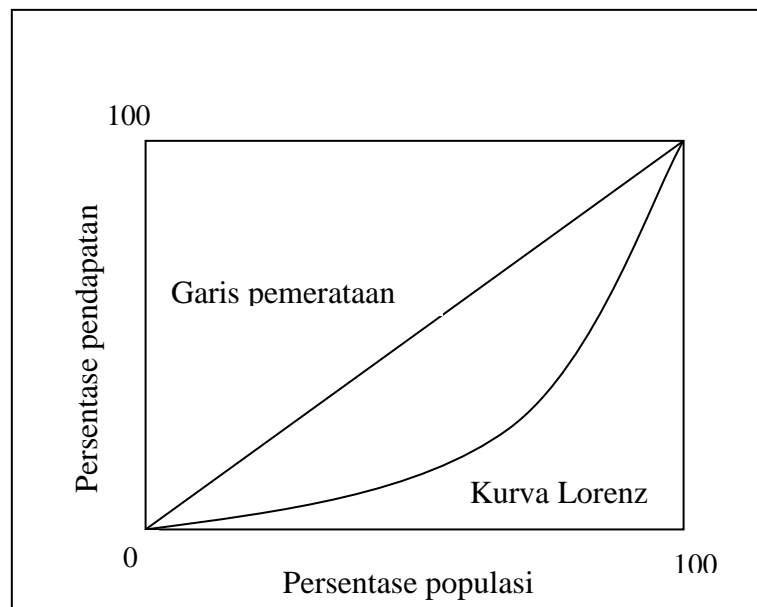


Sumber: Kuncoro (2003)

Menurut Todaro dan Smith (2004), Simon Kuznets mengatakan bahwa pada tahap awal pertumbuhan ekonomi cenderung memburuk namun pada tahap selanjutnya distribusi pendapatan akan membaik. Kurva Kuznets disebut sebagai kurva “U-terbalik” karena perubahan longitudinal (*time series*) dalam distribusi pendapatan seperti yang diukur misalnya oleh koefisien Gini. Kurva Kuznets ini sering dipakai sebagai ukuran tingkat ketimpangan antar kelompok ekstrem, yaitu kelompok yang sangat miskin dan kelompok yang sangat kaya di dalam suatu negara. Selain menggunakan Kurva Kuznets, metode lain yang lazim dipakai untuk menganalisis tingkat ketimpangan pendapatan perorangan adalah dengan menggunakan Kurva Lorenz.

Gambar 2.2

Kurva Lorenz



Sumber: Todaro dan Smith (2004)

Kurva Lorenz memperlihatkan hubungan kuantitatif aktual antara persentase penerima pendapatan dengan persentase pendapatan total yang benar-benar mereka terima selama satu satuan waktu. Dari gambar di bawah ini dapat dijelaskan bahwa semakin jauh jarak Kurva Lorenz dari garis diagonal (garis pemerataan sempurna), maka semakin timpang atau tidak merata distribusi pendapatannya (Todaro dan Smith, 2004).

2. Teori Pertumbuhan Ekonomi

Banyak ahli ekonomi yang mengungkapkan berbagai macam pendapat dan teori mengenai pertumbuhan ekonomi. Sukirno (2013) mendefinisikan pertumbuhan ekonomi sebagai perkembangan kegiatan dalam perekonomian yang menyebabkan barang dan jasa yang diproduksi dalam masyarakat bertambah. Berikut ini akan dijabarkan beberapa teori-teori pertumbuhan ekonomi oleh beberapa ahli.

a. Teori Klasik

Menurut pandangan ahli-ahli ekonomi Klasik ada empat faktor yang mempengaruhi pertumbuhan ekonomi, yaitu jumlah penduduk, jumlah stok barang-barang modal, luas tanah dan kekayaan alam, serta tingkat teknologi yang digunakan. Ahli ekonomi klasik menitikberatkan

perhatiannya kepada pengaruh pertambahan penduduk kepada pertumbuhan ekonomi (Sukirno, 2013).

Sukirno (2013) juga menambahkan bahwa dalam teori pertumbuhan Klasik dapat dilihat apabila terdapat kekurangan penduduk, produksi marginal lebih tinggi daripada pendapatan per kapita. Maka pertambahan penduduk akan menaikkan pendapatan per kapita. Akan tetapi bila penduduk sudah semakin banyak, produksi marginal akan mengalami penurunan sehingga pendapatan nasional dan pendapatan per kapita menjadi semakin lambat pertumbuhannya.

Adam Smith (dalam Boediono, 1985) mengungkapkan tentang bebas berusaha, dimana campur tangan pemerintah adalah minimal, menurut kaum Klasik bisa menjamin tercapainya:

- 1) Tingkat kegiatan ekonomi nasional yang optimal.
- 2) Alokasi sumber alam dan faktor produksi lain diantara berbagai macam kegiatan ekonomi secara efisien.

Robert Malthus (dalam Jhingan, 1999) menekankan bahwa perekonomian mengalami kemerosotan beberapa kali sebelum mencapai tingkat tertinggi dari pembangunan.

Berbeda dengan pendapat Adam Smith yang menyatakan penduduk berperan dalam mendorong pembangunan karena dapat memperluas pasar, Malthus menganggap bahwa pertumbuhan penduduk yang berjalan dengan cepat akan menurunkan tingkat pembangunan ekonomi ke taraf yang lebih rendah. Sedangkan David Ricardo berasumsi bahwa dalam perekonomian terdapat tiga kelompok yang saling berhubungan, yaitu tuan tanah, kapitalis, dan buruh (Jhingan, 1999).

b. Teori Schumpeter

Teori Schumpeter menekankan mengenai pentingnya peranan pengusaha di dalam mewujudkan pertumbuhan ekonomi. Ditunjukkan bahwa pengusaha merupakan golongan yang akan terus menerus membuat pembaharuan atau inovasi dalam kegiatan ekonomi (Sukirno, 2013).

Dalam Jhingan (1999), dikatakan bahwa teori Schumpeter menggarisbawahi pembiayaan inflasioner dan inovasi sebagai faktor utama dalam pembangunan ekonomi. Pembiayaan inflasioner merupakan satu metode tepat yang kini dicoba untuk diterapkan oleh setiap negara terbelakang. Analisnya relevan dengan negara terbelakang dilihat dari segi kenaikan jangka panjang produktivitas dan

penyerapan surplus tenaga kerja pada lapangan pekerjaan yang menguntungkan sebagai akibat dari inovasi.

c. Teori Harrod-Domar

Setiap perekonomian pada dasarnya harus senantiasa mencadangkan atau menabung sebagian tertentu dari pendapatan nasionalnya untuk menambah atau menggantikan barang-barang modal (gedung, alat-alat, dan bahan baku) yang telah susut atau rusak. Namun untuk memacu pertumbuhan ekonomi, dibutuhkan investasi baru yang merupakan tambahan neto terhadap cadangan atau stok modal (*capital stock*). Pada intinya Teori Harrod-Domar ini menyatakan bahwa agar bisa tumbuh dengan pesat, maka setiap perekonomian haruslah menabung dan berinvestasi sebanyak mungkin. Semakin banyak yang dapat ditabung dan kemudian diinvestasikan, maka laju pertumbuhan perekonomian itu akan semakin cepat (Todaro dan Smith, 2004).

Arsyad (1999) menjelaskan bahwa teori Harrod-Domar ini memiliki beberapa asumsi yaitu:

- 1) Perekonomian dalam keadaan full employment.
- 2) Perekonomian terdiri dari dua sektor, yaitu sektor rumah tangga dan sektor perusahaan.

- 3) Besarnya tabungan masyarakat adalah proporsional dengan besarnya pendapatan nasional.
- 4) Kecenderungan untuk menabung besarnya tetap, demikian juga rasio antara modal-output dan rasio penambahan modal-output.

Arsyad (1999) juga menambahkan bahwa model pertumbuhan ekonomi yang sederhana dapat disusun seperti berikut:

- 1) Tabungan (S) merupakan suatu proporsi (s) dari output total (Y). Diperoleh persamaan:

$$S = s \cdot Y \dots\dots\dots(2.2)$$

- 2) Investasi (I) didefinisikan sebagai perubahan stok modal, dilambangkan dengan (K) maka:

$$I = \Delta K \dots\dots\dots(2.3)$$

Tetapi karena stok modal (K) mempunyai hubungan langsung dengan output total (Y), maka:

$$\frac{K}{Y} = k \text{ atau } \frac{\Delta K}{\Delta Y} = k \text{ atau } \Delta K = k \cdot \Delta Y \dots\dots(2.3a)$$

- 3) Akhirnya, karena tabungan total (S) harus sama dengan investasi total (I), maka:

$$S = I \dots\dots\dots(2.4)$$

Tetapi dari persamaan (2.2) di atas kita tahu bahwa $S = s.Y$ dan dari persamaan (2.3) dan (2.3a) kita tahu bahwa $I = \Delta K = k. \Delta Y$. Oleh karena itu dapat ditulis identitas dari tabungan yang sama dengan investasi pada persamaan (2.3a) sebagai:

$$\frac{\Delta Y}{Y} = \frac{s}{k} \dots \dots \dots (2.5)$$

d. Teori Neo-Klasik

Model pertumbuhan Neo-Klasik Solow merupakan pilar yang sangat memberi kontribusi terhadap teori pertumbuhan Neo-Klasik sehingga penggagasnya, Robert Solow dianugerahi Hadiah Nobel. Pada intinya model ini merupakan pengembangan dari formulasi Harrod-Domar dengan menambahkan faktor kedua, yakni tenaga kerja serta memperkenalkan variabel independen ketiga yakni teknologi ke dalam persamaan pertumbuhan (*growth equation*). Namun berbeda dengan model Harrod-Domar yang mengasumsikan skala hasil tetap (*constant return to scale*) dengan koefisien baku, model pertumbuhan Solow berpegang pada konsep skala hasil yang terus berkurang (*diminishing returns*) dari input tenaga kerja dan modal jika keduanya dianalisis secara terpisah; jika keduanya

dianalisis secara bersamaan atau sekaligus, Solow juga memakai asumsi skala hasil tetap tersebut (Todaro dan Smith, 2004). Dalam persamaan, dapat dinyatakan sebagai berikut:

$$\Delta Y = f(\Delta K, \Delta L, \Delta T) \dots \dots \dots (2.6)$$

Dimana:

ΔY = tingkat pertumbuhan ekonomi

ΔK = tingkat pertumbuhan modal

ΔL = tingkat pertumbuhan penduduk

ΔT = tingkat perkembangan teknologi

Kemudian Todaro dan Smith (2004) juga menambahkan dalam bentuk yang lebih formal model pertumbuhan Neo-Klasik Solow memakai fungsi produksi agregat standar, yakni:

$$Y = K^\alpha (AL)^{1-\alpha}$$

Dimana Y adalah Produk Domestik Bruto, K adalah stok modal fisik dan modal manusia, L adalah tenaga kerja, dan A adalah produktivitas tenaga kerja yang pertumbuhannya ditentukan secara eksogen. Adapun simbol α melambangkan elastisitas output terhadap modal.

Menurut Arsyad (1999), dikatakan bahwa teori ini memberikan dua konsep pokok dalam pembangunan ekonomi daerah yaitu keseimbangan (equilibrium) dan mobilitas faktor produksi. Artinya, sistem perekonomian akan mencapai keseimbangan alamiahnya jika modal bisa mengalir tanpa restriksi (pembatasan). Oleh karena itu, modal akan mengalir dari daerah yang berupah tinggi ke daerah yang memiliki upah rendah.

B. Hubungan Antar Variabel

1. Hubungan Investasi Terhadap Ketimpangan Daerah

Sukirno (2013) menyatakan bahwa investasi atau yang lazim disebut juga dengan istilah penanaman modal merupakan pengeluaran penanam modal atau perusahaan untuk membeli barang modal dan perlengkapan produksi untuk menambah kemampuan memproduksi barang dan jasa yang tersedia dalam perekonomian. Pertambahan jumlah barang modal ini memungkinkan perekonomian tersebut menghasilkan lebih banyak barang dan jasa di masa yang akan datang. Ada kalanya penanaman modal dilakukan untuk menggantikan barang-barang modal yang lama yang telah aus dan perlu didepresiasi. Dalam praktiknya, yang digolongkan sebagai investasi meliputi pengeluaran berikut:

- a. Pembelian berbagai jenis barang modal, yaitu mesin dan peralatan produksi lain untuk mendirikan berbagai jenis industri dan perusahaan.
- b. Pengeluaran untuk mendirikan tempat tinggal, kantor, pabrik, dan bangunan lainnya.
- c. Pertambahan nilai stok barang yang belum terjual, bahan mentah dan barang yang masih dalam proses produksi pada akhir tahun penghitungan pendapatan nasional.

Kemudian Sukirno (2013) juga menambahkan, terdapat hal yang menjadi penentu-penentu yang menentukan tingkat investasi. Berbeda dengan yang dilakukan para konsumen yang membelanjakan pendapatan untuk membeli barang dan jasa yang dibutuhkan, penanam modal melakukan investasi bukan untuk memenuhi kebutuhan mereka tetapi untuk mencari keuntungan. Dengan demikian banyaknya keuntungan yang akan diperoleh besar sekali peranannya dalam menentukan tingkat investasi yang akan dilakukan oleh pengusaha. Di samping ditentukan oleh harapan di masa depan untuk memperoleh untung, beberapa faktor lain juga penting peranannya dalam menentukan tingkat investasi yang akan dilakukan dalam perekonomian. Faktor-faktor utama yang menentukan tingkat investasi adalah:

- a. Tingkat keuntungan yang diramalkan akan diperoleh.
- b. Suku bunga.

- c. Ramalan mengenai keadaan ekonomi di masa depan.
- d. Kemajuan teknologi.
- e. Tingkat pendapatan nasional dan perubahannya.
- f. Keuntungan yang diperoleh perusahaan-perusahaan.

Investasi sendiri dapat dibedakan menjadi dua yaitu Penanaman Modal Asing (PMA) dan Penanaman Modal Dalam Negeri (PMDN). Dua hal tersebut tercantum pada Undang-Undang Republik Indonesia No. 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal.

a. Penanaman Modal Asing (PMA)

Sesuai dengan pasal 1 ayat 3, tertulis bahwa penanaman modal asing adalah kegiatan menanam modal untuk melakukan usaha di wilayah negara Republik Indonesia yang dilakukan oleh penanam modal asing, baik yang menggunakan modal asing sepenuhnya maupun yang berpatungan dengan penanam modal dalam negeri.

b. Penanaman Modal Dalam Negeri (PMDN)

Sesuai dengan pasal 1 ayat 2, tertulis bahwa penanaman modal dalam negeri adalah kegiatan menanam modal untuk melakukan usaha di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia yang dilakukan oleh penanam modal dalam negeri dengan menggunakan modal dalam negeri.

Investasi memiliki kaitan yang cukup erat dengan kesejahteraan suatu daerah atau proses pembangunan ekonomi di suatu daerah. Hal ini sesuai berdasar teori pertumbuhan Harrod Domar yang menerangkan bahwa terdapat korelasi di antara tingkat investasi dan laju pertumbuhan ekonomi. Artinya, rendahnya investasi di suatu wilayah akan membuat pertumbuhan ekonomi dan tingkat pendapatan per kapita masyarakat di wilayah tersebut akan rendah karena tidak ada kegiatan ekonomi yang produktif (Nurhayani, Siti, dan Adi, 2015).

2. Hubungan IPM Terhadap Ketimpangan Daerah

Manusia adalah kekayaan bangsa yang sesungguhnya sehingga tujuan akhir pembangunan harus difokuskan pada manusia. Kondisi ini akan menciptakan lingkungan yang memungkinkan masyarakat untuk dapat menikmati umur panjang, sehat, dan menjalankan kehidupan yang produktif. Konsep ini menjadi cikal bakal munculnya Indeks Pembangunan Manusia. *United Nations Development Programme* (UNDP) memperkenalkan IPM pertama kali pada tahun 1990 (Badan Pusat Statistik, 2015).

IPM merupakan pengukuran perbandingan dari harapan hidup, melek huruf, pendidikan dan standar hidup untuk semua negara di seluruh dunia. Menurut BPS, IPM menjelaskan bagaimana penduduk dapat mengakses hasil pembangunan dalam

memperoleh pendapatan, kesehatan, pendidikan, dan sebagainya.

IPM dibentuk dari tiga dimensi dasar, yaitu:

- a. Umur panjang dan hidup sehat (*a long and healthy life*)
- b. Pengetahuan (*knowledge*)
- c. Standar hidup layak (*decent standard of living*)

Menurut BPS, IPM dikelompokkan menjadi beberapa kategori, yaitu:

- a. $IPM < 60$ = IPM rendah
- b. $60 \leq IPM < 70$ = IPM sedang
- c. $70 \leq IPM < 80$ = IPM tinggi
- d. $IPM \geq 80$ = IPM sangat tinggi

IPM menunjukkan dengan jelas bahwa kesenjangan dalam pendapatan lebih besar daripada kesenjangan dalam indikator pembangunan yang lain, paling tidak dalam indikator kesehatan dan pendidikan. IPM juga mengingatkan kita bahwa pembangunan yang kita maksudkan ialah pembangunan manusia dalam arti luas, bukan hanya dalam bentuk pendapatan yang lebih tinggi. Kesehatan dan pendidikan bukan hanya input fungsi produksi namun juga merupakan tujuan pembangunan yang fundamental (Todaro dan Smith, 2004).

Menurut Hartini (2017), tinggi atau rendahnya IPM akan berdampak pada tingkat produktivitas penduduk, semakin rendah

IPM maka tingkat produktivitasnya akan rendah kemudian produktivitas yang rendah akan berpengaruh pada rendahnya pendapatan. Begitu pula sebaliknya semakin tinggi IPM maka akan semakin tinggi tingkat produktivitas penduduknya yang kemudian mendorong tingkat pendapatan menjadi semakin tinggi. Permasalahan yang terjadi adalah IPM tiap daerah itu berbeda, hal ini menjadikan IPM salah satu faktor yang berpengaruh pada ketimpangan antar daerah.

3. Hubungan Aglomerasi Terhadap Ketimpangan Daerah

Montgomery (1998) mendefinisikan aglomerasi sebagai konsentrasi spasial dari aktifitas ekonomi di kawasan perkotaan karena “penghematan akibat lokasi yang berdekatan (*economies of proximity*) yang diasosikan dengan *kluster spasial* dari perusahaan, para pekerja, dan konsumen”. Hal ini senada dengan Markusen (1996) yang menyatakan bahwa aglomerasi merupakan suatu lokasi yang “tidak mudah berubah” akibat adanya penghematan eksternal yang terbuka bagi semua perusahaan yang letaknya berdekatan dengan perusahaan lain dan penyedia jasa-jasa; dan bukan akibat kalkulasi perusahaan atau para pekerja secara individual (Kuncoro, 2002).

Menurut Hoover (dalam Sodik dan Iskandar, 2007), terdapat tiga manfaat yang ditimbulkan oleh kegiatan aglomerasi, yaitu penghematan skala (*scale economies*), yang merupakan

keuntungan yang diperoleh perusahaan karena membesarnya skala produksi perusahaan tersebut pada suatu lokasi. Penghematan lokasi (*localization economies*), merupakan keuntungan yang diperoleh bagi semua perusahaan dalam industri yang sama dalam suatu lokasi. Dan yang terakhir adalah penghematan urbanisasi (*urbanization economies*), merupakan keuntungan bagi semua industri pada suatu lokasi yang sama sebagai konsekuensi membesarnya skala ekonomi (penduduk, pendapatan, output atau kemakmuran) dari lokasi tersebut.

Menurut Sjafrizal (2008), aglomerasi yang cukup tinggi akan menyebabkan pertumbuhan ekonomi daerah cenderung tumbuh lebih cepat. Kondisi tersebut akan mendorong proses pembangunan daerah melalui peningkatan penyediaan lapangan kerja dan tingkat pendapatan masyarakat. Akan tetapi daerah yang memiliki tingkat aglomerasi rendah akan membuat daerah tersebut semakin terbelakang.

Aglomerasi diukur dengan menggunakan proksi yang digunakan dalam penelitian Jaime Bonet (2006) yaitu menggunakan ukuran aglomerasi industri dengan menghitung *share* PDRB wilayah terhadap PDRB total. Formula untuk menghitung aglomerasi yaitu:

$$Aglomerasi = \frac{PDRB_i}{PDRB_0} \dots \dots \dots (2.9)$$

Dimana:

$PDRB_i$ = PDRB ADHK 2010 Provinsi di Indonesia

$PDRB_o$ = PDB ADHK 2010 Indonesia

Menurut Martin dan Octaviano (dalam Sodik dan Iskandar, 2007), aglomerasi menghasilkan perbedaan spasial dalam tingkat pendapatan. Semakin teraglomerasi secara spasial suatu perekonomian maka akan semakin meningkat pertumbuhannya. Daerah-daerah yang banyak industri tumbuh lebih cepat dibanding daerah yang hanya mempunyai sedikit industri. Alasannya adalah daerah yang memiliki industri lebih banyak memiliki akumulasi modal. Dengan kata lain, daerah dengan konsentrasi industri tumbuh lebih cepat dibandingkan dengan daerah yang tidak punya konsentrasi industri, sehingga hal ini yang memicu tingkat ketimpangan antar daerah.

4. Hubungan TPT Terhadap Ketimpangan Daerah

Menurut BPS, pengangguran merupakan bagian dari angkatan kerja yang tidak bekerja atau sedang mencari pekerjaan atau sedang mempersiapkan suatu usaha, mereka yang tidak mencari pekerjaan karena merasa tidak mungkin untuk mendapatkan pekerjaan dan mereka yang sudah memiliki pekerjaan tetapi belum mulai bekerja. Tingkat pengangguran terbuka dapat dihitung dengan rumus :

$$TPT = \frac{\Sigma \text{ orang yang mencari kerja}}{\Sigma \text{ angkatan kerja}} \times 100\% \dots \dots \dots (2.10)$$

Menurut Sukirno (2013), pengangguran dibedakan menjadi empat jenis berdasarkan penyebabnya, yaitu sebagai berikut :

- a. Pengangguran normal atau friksional, yaitu pengangguran yang disebabkan oleh tindakan seseorang yang keluar dari pekerjaan awal untuk mencari pekerjaan lain yang lebih baik sesuai dengan keinginannya.
- b. Pengangguran siklikal, yaitu pengangguran yang disebabkan oleh naik turunnya kegiatan perekonomian sehingga perusahaan melakukan pengurangan pekerja atau menutup perusahaannya, maka pengangguran akan bertambah.
- c. Pengangguran struktural, yaitu pengangguran yang disebabkan oleh perubahan struktur kegiatan ekonomi.
- d. Pengangguran teknologi, yaitu pengangguran yang disebabkan oleh semakin banyaknya penggunaan mesin dan kemajuan teknologi lainnya.

Sedangkan berdasarkan cirinya, Sukirno (2013) menggolongkan pengangguran menjadi empat golongan sebagai berikut :

- a. Pengangguran terbuka, yaitu angkatan kerja yang sama sekali tidak memiliki pekerjaan, tercipta sebagai akibat dari penambahan lowongan pekerjaan yang lebih rendah dari penambahan tenaga kerja.
- b. Pengangguran tersembunyi, yaitu pengangguran yang terjadi karena jumlah pekerja dalam suatu kegiatan ekonomi lebih besar dari yang sebenarnya diperlukan agar dapat melakukan kegiatannya dengan efisien.
- c. Pengangguran musiman, yaitu pengangguran yang terjadi karena adanya fluktuasi kegiatan ekonomi jangka pendek. Pengangguran ini biasanya terdapat di sektor pertanian dan perikanan.
- d. Setengah menganggur, yaitu pekerja yang jam kerjanya di bawah jam kerja normal, hanya bekerja satu hingga dua hari dalam seminggu atau satu hingga empat jam dalam satu hari.

Tingkat pengangguran merupakan salah satu hal yang menjadi indikator penting untuk mengukur tingkat kesejahteraan masyarakat daerah. Tingkat pengangguran yang tinggi mencerminkan tingkat kesejahteraan masyarakat yang masih rendah, sebaliknya tingkat pengangguran yang rendah mencerminkan tingkat kesejahteraan masyarakat yang tinggi (Sjafrizal, 2014).

Menurut Dhyatmika dan Atmanti (2013), daerah yang memiliki kondisi demografis yang baik akan memiliki produktivitas kerja penduduknya yang lebih tinggi dibanding dengan daerah yang memiliki kondisi demografis yang kurang baik. Sehingga akan mendorong peningkatan investasi ke daerah yang bersangkutan. Lessman (2006) (dalam Dhyatmika dan Atmanti, 2013) mengatakan, tingkat pengangguran yang tinggi berhubungan dengan semakin tingginya ketimpangan daerah.

C. Hasil Penelitian Terdahulu

Tabel 2.1
Penelitian Terdahulu

No.	Peneliti, Tahun, Judul	Variabel	Metode Analisis	Hasil Penelitian
1.	Michael Albert Baransano, Eka Intan Kumala Putri, Noer Azam Achsani, dan Lala M. Kolopaking (2016), <i>Analysis of Factors Affecting Regional Development Disparity in the Province of West Papua (2005-2014)</i>	<ul style="list-style-type: none"> • Indeks Williamson • PDRB per kapita • Jumlah penduduk • Dana Perimbangan • IPM 	Regresi data panel	<ol style="list-style-type: none"> 1) PDRB per kapita signifikan dan berpengaruh positif. 2) Jumlah penduduk signifikan dan berpengaruh positif. 3) Dana Perimbangan signifikan dan berpengaruh positif. 4) IPM signifikan dan berpengaruh positif.
2.	Ketut Wahyu Dhyatmika, dan Hastarini Dwi Atmanti (2013), <i>Analisis Ketimpangan Pembangunan Provinsi Banten Pasca Pemekaran (2001-2011)</i>	<ul style="list-style-type: none"> • Indeks Williamson • PMA • Pengeluaran pemerintah • Tingkat pengangguran 	Tipologi Klassen, Analisis data panel model <i>Fixed Effect</i>	<ol style="list-style-type: none"> 1) Variabel PMA signifikan dan berpengaruh positif. 2) Variabel pengeluaran pemerintah signifikan berpengaruh negatif. 3) Variabel pengangguran berpengaruh positif akan tetapi tidak signifikan di alpha (α) 10%. 4) Berdasar Tipologi Klassen,

				Provinsi Banten dapat dibagi menjadi tiga klasifikasi yaitu daerah maju dan cepat tumbuh (Kota Cilegon dan Kota Tangerang), daerah berkembang (Kabupaten Tangerang), dan daerah tertinggal (Kabupaten Pandeglang, Lebak, dan Serang).
3.	Muhammad Fajrii, Arman Delis, dan Yohanes Vyn Amzar (2016), <i>Dampak Otonomi Fiskal, Pertumbuhan Ekonomi, dan Keterbukaan Daerah terhadap Ketimpangan Wilayah di Sumatera (2009-2013)</i>	<ul style="list-style-type: none"> • PAD • Total pendapatan • PDRB • PDRB per kapita • Nilai ekspor • PDB per kapita 	Data panel dengan model <i>Random Effect</i>	<ol style="list-style-type: none"> 1) DOF memiliki pengaruh negatif terhadap ketimpangan wilayah. 2) Pertumbuhan ekonomi memiliki pengaruh negatif terhadap ketimpangan wilayah. 3) Keterbukaan daerah memiliki pengaruh positif terhadap ketimpangan wilayah.
4.	Reena Kumari (2014), <i>Development and Disparity in</i>	Terdapat 34 indikator yang diambil dari empat sektor;	Pengklasifikasian wilayah berdasarkan	Pembangunan hanya terpusat di Patna, yang mana merupakan ibukota suatu wilayah di India sehingga

	<i>Bihar, Two Time Periods 2001 and 2010-2011</i>	pertanian, pelayanan jasa, pendidikan, dan kesehatan	pembangunan ekonomi dan sosial	mampu memaksimalkan sumber daya yang dimiliki.
5.	Ahmad Fawaiq Suwanan dan Eka Heni Sulistiani (200), <i>Fiscal Decentralization and Regional Disparities in Indonesia: A Dynamic Panel Data Evidence 2001-2008</i>	<ul style="list-style-type: none"> • PAD • Rasio Gini • Pengangguran • PDRB per kapita • Populasi 	Data panel dengan model <i>Fixed Effect</i>	PAD, pengangguran, dan populasi memiliki pengaruh yang signifikan terhadap ketimpangan. Sedangkan PDRB per kapita tidak berpengaruh signifikan terhadap ketimpangan.
6.	Constantin Postoiu dan Ionut Busega (2015), <i>Inter-Regional Disparities in the European Union</i>	<ul style="list-style-type: none"> • PDRB per kapita • Tenaga kerja 	Metode konvergensi sigma	PDRB per kapita dan tenaga kerja yang besar terjadi di bagian tengah ke atas Uni Eropa (Hamburg, Brussels, Luxembourg, Paris, Milan), dimana terjadi konsentrasi ekonomi yang tinggi. Sedangkan daerah yang agak terbelakang di Uni Eropa kebanyakan dari daerah timur, selatan, dan barat, contohnya hampir seluruh wilayah Yunani, Italia Selatan, dan wilayah barat daya Spanyol.
7.	Nita Tri Hartini	<ul style="list-style-type: none"> • PDRB per 	Data panel	1) PDRB per kapita

	(2017), <i>Pengaruh PDRB per kapita, Investasi, dan IPM Terhadap Ketimpangan Pendapatan Antar Daerah di Provinsi DIY Tahun 2011-2015</i>	<ul style="list-style-type: none"> • kapita • Investasi • IPM 	dengan model <i>Fixed Effect</i>	<p>berpengaruh positif signifikan terhadap ketimpangan pendapatan.</p> <p>2) Investasi dan IPM berpengaruh negatif signifikan terhadap ketimpangan pendapatan.</p>
8.	Hasnah Ali, A. C. Er, A. R. Ahmad, N. Lyndon, dan Sanep Ahmad (2013), <i>An Analysis of the Impact of Foreign Investment on Regional Disparities: A Case of Malaysia 1980-2008</i>	<ul style="list-style-type: none"> • PDRB • PMDN • PMA • Tenaga kerja 	Data panel dengan model <i>Fixed Effect</i> dan <i>Random Effect</i>	PMA memiliki pengaruh positif dan signifikan karena PMA meningkatkan pertumbuhan ekonomi di wilayah yang memiliki PDB tinggi. Sehingga PMA hanya terfokus di daerah yang maju terutama di daerah pusat, utara, dan selatan, yang menyebabkan peningkatan ketimpangan di Malaysia.
9.	Ardito Bhinadi (2003), <i>Disparitas Pertumbuhan Ekonomi Jawa dengan Luar Jawa 1987-2000</i>	<ul style="list-style-type: none"> • Pertumbuhan PDRB per kapita • Pertumbuhan kapital • Pertumbuhan tenaga kerja • Pertumbuhan SDM 	Data panel dengan model <i>Fixed Effect</i>	Pertumbuhan kapital mempengaruhi pertumbuhan ekonomi regional. Akan tetapi tidak dengan pertumbuhan tenaga kerja dan SDM yang tidak mempengaruhi pertumbuhan ekonomi regional. Hasil dari tes statistik menunjukkan bahwa tidak

				terdapat ketimpangan pembangunan daerah.
10.	Paula Nistor (2012), <i>FDI and Regional Disparities Growth in Romania 2003-2011</i>	<ul style="list-style-type: none"> • PMA • PDB per kapita 	Pengklasifikasian tabel	PMA cenderung meningkatkan ketimpangan, karena PMA hanya terfokus di wilayah maju seperti di Bukares.
11.	Jamzani Sodik dan Dedi Iskandar (2007), <i>Aglomerasi dan Pertumbuhan Ekonomi: Peran Karakteristik Regional di Indonesia tahun 1994-2003</i>	<ul style="list-style-type: none"> • Aglomerasi • Laju angkatan kerja • Laju inflasi • Laju <i>openness</i> • <i>Human capital</i> 	Data panel dengan model <i>Fixed Effect</i>	<ol style="list-style-type: none"> 1) Variabel laju angkatan kerja, inflasi, dan <i>openness</i> berpengaruh signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi. 2) Variabel aglomerasi dan <i>human capital</i> tidak memiliki pengaruh yang signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi.
12.	Linda Ika Wahyuntari dan Amin Pujiati (2016), <i>Disparitas Pembangunan Wilayah Kabupaten/Kota di Provinsi Jawa Tengah tahun 2009-2013</i>	<ul style="list-style-type: none"> • Aglomerasi • Dana perimbangan • IPM • Klasifikasi daerah cepat maju dan cepat tumbuh 	Metode analisis Tipologi Klassen dan data panel dengan model <i>Random Effect</i>	<ol style="list-style-type: none"> 1) Aglomerasi berpengaruh positif dan signifikan terhadap disparitas pembangunan wilayah. 2) Dana perimbangan, IPM, dan klasifikasi daerah cepat maju dan cepat tumbuh berpengaruh negatif dan signifikan terhadap disparitas pembangunan wilayah.

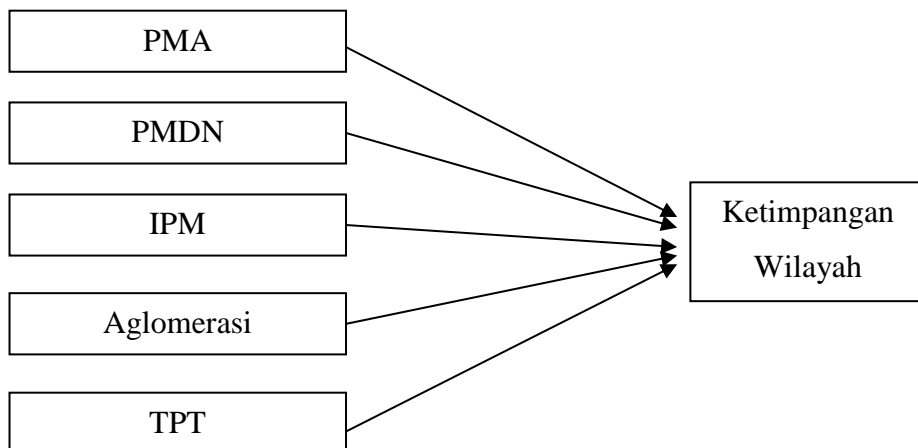
13.	Kurt Geppert, Andreas Stephan, dan Michael Happich (2008), <i>Regional Disparities in the European Union: Convergence and Agglomeration 1980-2000</i>	<ul style="list-style-type: none"> • Populasi penduduk • Data pendapatan • Laju PDB per kapita • Aglomerasi 	Analisis rantai Markov dan regresi data <i>cross section</i>	<ol style="list-style-type: none"> 1) Pendapatan regional per kapita di 15 negara Uni Eropa mengalami pertumbuhan. 2) Menurunnya ketimpangan daerah terjadi di antara negara, bukan di antara wilayah di satu negara. 3) Adanya aglomerasi di kegiatan perekonomian malah meningkatkan ketimpangan di antara negara anggota Uni Eropa.
14.	Muhammad Hidayat (2014), <i>Inequality Across Districts and Cities in the Riau 2003-2012</i>	<ul style="list-style-type: none"> • Alokasi belanja infrastruktur • IPM • Alokasi spesialisasi daerah 	Indeks Theil dan regresi	<ol style="list-style-type: none"> 1) Dengan Indeks Theil terdapat ketimpangan pembangunan antar daerah di Provinsi Riau. 2) Dengan regresi ditemukan bahwa IPM berpengaruh negatif dan signifikan terhadap ketimpangan di Provinsi Riau. 3) Alokasi belanja infrastruktur dan alokasi spesialisasi daerah berpengaruh positif dan signifikan terhadap ketimpangan pembangunan di Provinsi Riau.
15.	Drisnaf	<ul style="list-style-type: none"> • DAU 	Indeks	1) Di tahun 2001-2006,

	Swastyardi (2008), <i>Regional Inequality in Indonesia: Is the General Allocation Fund (DAU) Likely to Have an Impact? 2001-2006</i>	<ul style="list-style-type: none"> • PDRB 	Theil dengan aplikasi Stata	<p>ketimpangan di tingkat nasional cenderung stabil, dengan tren yang menurun.</p> <p>2) Pemerintah daerah menjadi lebih efektif dibanding sebelum diterapkannya desentralisasi fiskal. Efeknya, ketimpangan menjadi menurun.</p> <p>3) DAU memiliki pengaruh terhadap ketimpangan.</p>
16.	Nurhayani, Siti Hodijah, Adi Bhakti (2015), <i>Analisis Disparitas Pembangunan Ekonomi dan Hubungannya dengan Investasi di Provinsi Jambi Tahun 2002-2004</i>	<ul style="list-style-type: none"> • PMA • PMDN 	Model Indeks Williamson	<p>1) Terdapat hubungan yang lemah antara PMDN dengan ketimpangan dan arahnya positif.</p> <p>2) Terdapat hubungan negatif pada PMA terhadap ketimpangan, akan tetapi tidak signifikan.</p>
17.	Yuki Angelia (2010), <i>Analisis Ketimpangan Pembangunan Wilayah di Provinsi Jakarta Tahun 1995-2008</i>	<ul style="list-style-type: none"> • PDRB per kapita • Investasi • Aglomerasi • Desentralisasi fiskal 	Analisis statistik deskriptif dan analisis regresi.	<p>1) PDRB per kapita dan aglomerasi berpengaruh positif signifikan.</p> <p>2) Investasi berpengaruh negatif signifikan.</p> <p>3) Desentralisasi fiskal berpengaruh negatif tidak signifikan.</p>

D. Kerangka Pemikiran

Berdasarkan pada landasan teori dan penelitian-penelitian terdahulu mengenai berbagai hubungan antara variabel independen (PMA, PMDN, IPM, aglomerasi dan TPT) terhadap variabel dependen (ketimpangan wilayah), maka faktor-faktor yang mempengaruhi ketimpangan wilayah di setiap provinsi di Indonesia dapat digambarkan dengan kerangka pikir penelitian sebagai berikut:

Gambar 2.3
Kerangka Berpikir



E. Hipotesis

Hipotesis merupakan dugaan yang mungkin benar atau salah. Berdasarkan pada paparan di atas mulai dari latar belakang, batasan masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, dan kerangka berpikir, maka dapat diajukan hipotesis sebagai berikut:

1. Diduga PMA berpengaruh positif terhadap ketimpangan daerah di provinsi-provinsi di Indonesia.
2. Diduga PMDN berpengaruh positif terhadap ketimpangan daerah provinsi-provinsi di Indonesia.
3. Diduga IPM berpengaruh negatif terhadap ketimpangan daerah provinsi-provinsi di Indonesia.
4. Diduga aglomerasi berpengaruh positif terhadap ketimpangan daerah provinsi-provinsi di Indonesia.
5. Diduga TPT berpengaruh positif terhadap ketimpangan daerah provinsi-provinsi di Indonesia.